

Judul : Ombudsman RI: Ada Kelalaian dalam Penanganan
Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Ombudsman RI: Ada Kelalaian dalam Penanganan

JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman RI menduga ada maladministrasi dan pengabaian kewajiban hukum dalam penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Kelalaian itu menyebabkan kasus PMK meledak dan menyebar luas.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, pada Rabu (15/6/2022) mengatakan, pihaknya menduga ada kelalaian pejabat otoritas veteriner terkait, kepala daerah terkait, dan Menteri Pertanian dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sehingga berdampak pada meledak dan meluasnya PMK.

Kasus PMK terdeteksi sejak 28 April 2022. Hingga pertengahan Juni 2022, kasus itu telah menyebar ke 18 provinsi. Sementara ternak yang sudah divaksin baru 33 ekor. Pusat Krisis Penanganan dan Penanggulangan PMK, per Rabu (15/6)

pukul 20.32 WIB, mencatat jumlah hewan ternak yang sakit PMK mencapai 170.018 ekor.

Ombudsman RI menyarankan Kementerian Pertanian profesional serta menjalankan semua tugas dan kewenangan penanggulangan dan pengendalian PMK sesuai dengan perundangan. Menurut Yeka, PMK merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan paling ditakuti di dunia peternakan. Penyakit itu berdampak sistemik dan meningkatkan kerugian peternak. Saat ini, angka penularan PMK mencapai 100 persen dengan tingkat kematian di bawah 5 persen. Serangan PMK berdampak pada penurunan produktivitas dan sulit pulih.

Perlu transparan

Yeka meminta pemerintah untuk transparan terkait dengan anggaran Rp 4,41 triliun guna mengatasi wabah PMK. Dalam rapat kerja Komisi IV

DPR dengan Menteri Pertanian pada 13 Juni 2022, DPR menyetujui usulan pemerintah terkait dengan kebutuhan anggaran penanganan PMK tahun ini sebesar Rp 4,41 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk pembelian vaksin, obat-obatan, desinfektan, penggantian ternak mati, dan operasional pendukung. Namun, kata Yeka, pihaknya belum menemukan dasar putusan dan rencana kerja itu. Kajiannya dinilai tidak transparan.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Organisasi Peternak, Mahasiswa, dan Tenaga Kesehatan Hewan Indonesia meminta pemerintah segera menyatakan wabah PMK sebagai kejadian luar biasa serta membentuk satuan tugas agar kebijakan pusat-daerah sinergis. "PMK masih dimungkinkan meluas dan penanganan butuh waktu lama. Perlu peran semua pemangku," kata Budiono, Ke-

tua Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Sapi Indonesia.

Dewan Penasihat Komite Sapi Indonesia Rochadi Tawaf mengemukakan, wabah PMK saat ini telah meluas ke 18 provinsi. Meski pemerintah telah melakukan sejumlah langkah penanganan, penyebaran penyakit jauh lebih cepat dan memicu kematian hewan ternak. Persoalan PMK dikhawatirkan terus meluas tanpa penanganan cepat.

Dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, pihaknya tidak menyederhanakan PMK. Menurut dia, jajaran Kementerian Pertanian serius menangani PMK. Pihaknya juga menjamin ternak dari daerah-daerah hijau bisa keluar untuk keperluan Idul Adha. Sementara dari daerah-daerah wabah, ia memastikan akan memperketat lalu lintas serta menjamin produksi. (LKT)